



**Judul** : Terima masukan Busyro Cs, Ketua DPR Jamin RUU Terorisme bukan alat politik  
**Tanggal** : Selasa, 22 Mei 2018  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Terima Masukan Busyro Cs Ketua DPR Jamin RUU Terorisme Bukan Alat Politik

PASCA-kerusuhan di Rutan Mako Brimod dan rangkaian bom bunuh diri di Surabaya, banyak pihak meminta RUU Terorisme segera disahkan. Di sisi lain, ada juga yang khawatir dengan keberadaan aturan tersebut nanti. Menyikapi hal ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan, RUU Terorisme segera disahkan. Untuk yang khawatir, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menjamin RUU itu tidak akan menjadi alat politik para penguasa.

Jaminan itu disampaikan Bamsoet saat menerima rombongan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang dipimpin Busyro Muqoddas di Ruang Kerja Ketua DPR, Senayan, kemarin. Busyro Cs datang untuk memberi masukan pembahasan RUU itu. Bamsoet menerima masukan itu dengan baik.

Di awal pertemuan, Bamsoet menjelaskan bahwa DPR sedang mengebut agar RUU itu bisa selesai di akhir Mei ini. "Minggu ini Pansus RUU Terorisme mulai melakukan berbagai rapat, baik internal maupun bersama Pemerintah. Hal-hal yang belum sinkron akan segera kita sinkronkan. Saya yakin, RUU Terorisme bisa disetujui sebelum matahari terbenam di akhir Mei," tuturnya.

Bamsoet meyakinkan masyarakat, dua tahun proses pembahasan RUU Terorisme yang sudah berjalan tidak akan sia-sia. DPR selalu berupaya agar bisa memperbaiki kekurangan atau melakukan reformulasi yang lebih baik terhadap keberadaan UU Terorisme.

"Saya memberikan jaminan berjalannya prinsip *due process of law* dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Penguatan terhadap peran aparat penegak hukum

akan dibarengi dengan adanya pengawasan yang berimbang serta memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban," papar politisi Partai Golkar ini.

Setelah itu, baru Bamsoet memberikan jaminan bahwa RUU Terorisme tidak akan dijadikan alat politik oleh penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Pembahasan RUU Terorisme dilakukan dengan spirit kepentingan nasional.

"Pasal demi pasal yang tertulis di dalam RUU Terorisme telah melampaui berbagai kajian mendalam yang melibatkan banyak pihak, dari mulai akademisi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, aparat hukum, maupun lainnya. Undang-Undang yang dihasilkan nanti benar-benar demi kepentingan nasional," ujarnya.

Bamsoet mengapresiasi dukungan PP Muhammadiyah terhadap RUU Terorisme. Dia berharap, dengan peran civil society semacam ini, proses pembuatan Undang-Undang akan semakin komprehensif dan sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat.

"Masukan dan usulan dari PP Muhammadiyah sangat berharga. Antara lain perubahan nama menjadi RUU Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme, pelibatan intelijen dan militer dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, masa penangkapan 7x24 jam dan bisa diperpanjang 7x24 jam atas izin Ketua Pengadilan Negeri, adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, serta perlu adanya sanksi ke aparat hukum yang melakukan kekerasan ke para terduga teroris. Ini semua sudah saya catat dan akan dibahas oleh Pansus sehingga bisa menjadi tambahan kajian," pungkas Bamsoet. ■ us